

## DEKOMPOSISI KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN DETERMINAN POSISI EKONOMI

**Dwi Rizky Syaifullah<sup>1</sup>, Diah Mekita Sari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Kota Kupang; <sup>2</sup>Badan Pusat Statistik

<sup>1</sup>rizky.syaiful@bps.go.id; <sup>2</sup>mekita.sari@bps.go.id

(Diterima: Februari 2021; Disetujui: Juni 2021)

**Abstract.** High inequality between regions is one of the causes of high income inequality and hampered economic growth in NTT Province. The purpose of this study is to analyze the inequality between regencies within and cross islands, also the factors that affect economic position of every regency in NTT Province. This study uses data from BPS's publication and DJPK website. Descriptive analysis using Theil's Index to decompose income inequality and Klassen's Typology to classify economic positions. Inference analysis using Multinomial Logistic Regression is to analyze the determinants of economic position of each regency. Analysis with Theil's Index shows that main cause of inequality between regencies is inequality between regencies within island, while inequality cross islands is relatively low. The centralization of the economy in several regencies within each island is the cause of high income inequality between regencies. The quality of human resources has significant effect on increasing the tendency of regency that are in economic position of underdeveloped regions to become regions with fast progress and fast growing classification or developed but depressed regions classification. Therefore, improving the quality of human resources is a way that can be done to reduce income inequality between regencies in NTT Province.

**Keyword:** *klassen typology, multinomial logistic regression, per capita grdp, theil index grdp.*

**Abstraksi.** Ketimpangan antar kabupaten/kota yang tinggi menjadi salah satu penyebab tingginya ketimpangan pendapatan dan tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran ketimpangan antar kabupaten/kota serta antar pulau dan faktor-faktor yang mempengaruhi posisi ekonomi kabupaten/kota di Provinsi NTT. Penelitian ini menggunakan data dari publikasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka dan situs web DJPK. Analisis deskriptif pada penelitian ini menggunakan Indeks Theil untuk melakukan dekomposisi ketimpangan pendapatan dan Tipologi Klassen untuk mengklasifikasikan posisi ekonomi. Sementara itu, analisis inferensia menggunakan Regresi Logistik Multinomial untuk menganalisis determinan dari posisi ekonomi kabupaten/kota di Provinsi NTT. Analisis dengan Indeks Theil menunjukkan bahwa penyebab utama ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi NTT adalah ketimpangan di antara kabupaten/kota dalam masing-masing pulau, sedangkan ketimpangan antar pulau relatif rendah. Terpusatnya perekonomian di beberapa kabupaten/kota dalam masing-masing pulau menjadi penyebab tingginya ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi NTT. Kualitas SDM berpengaruh signifikan untuk meningkatkan kecenderungan kabupaten yang berada pada posisi ekonomi daerah tertinggal menjadi klasifikasi daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh atau daerah maju tetapi tertekan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM merupakan cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi NTT.

**Kata kunci:** *indeks theil, pdrb, pdrb perkapita, regresi logistik multinomial, tipologi klassen.*

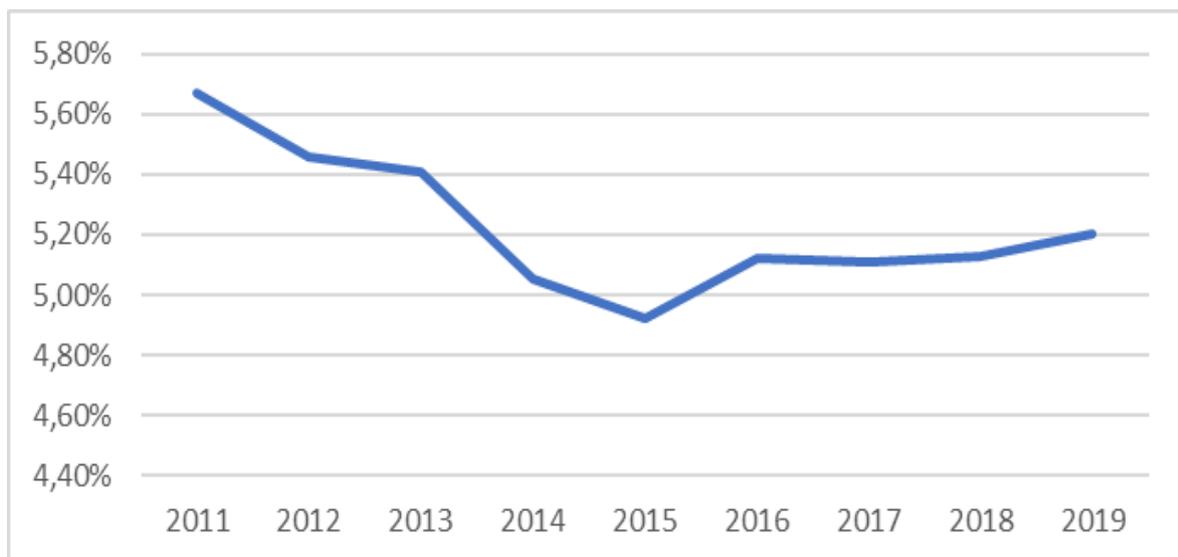
## PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan menjadi inti dari semua masalah pembangunan dan tujuan utama dari kebijakan pembangunan (Todaro & Smith, 2012). Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti oleh pengentasan ketimpangan pendapatan dapat menjadi bom waktu yang menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerataan pendapatan termasuk salah satu tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di Indonesia, keseriusan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pendapatan tertuang dalam tujuh agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu pengurangan kesenjangan dan pemerataan wilayah (Perpres No. 18 Tahun 2020).

Ketimpangan antardaerah dapat teratasi jika terjadi konvergensi pendapatan di daerah tersebut. Konvergensi pendapatan

merupakan kondisi saat daerah yang miskin bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang kaya (Mankiw, 2010).

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak daerah tertinggal. Pada tahun 2020 terdapat 13 dari 22 kabupaten/kota di Provinsi NTT masuk ke dalam kategori daerah yang tertinggal (Perpres No 63 Tahun 2020). Selain itu, NTT juga menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian khusus dalam percepatan pembangunan daerah pinggiran (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2015). Kondisi ini seharusnya membuat pertumbuhan ekonomi di NTT lebih cepat dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia berdasarkan konsep konvergensi sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT cenderung melambat dan stagnan sejak tahun 2016.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2011-2020

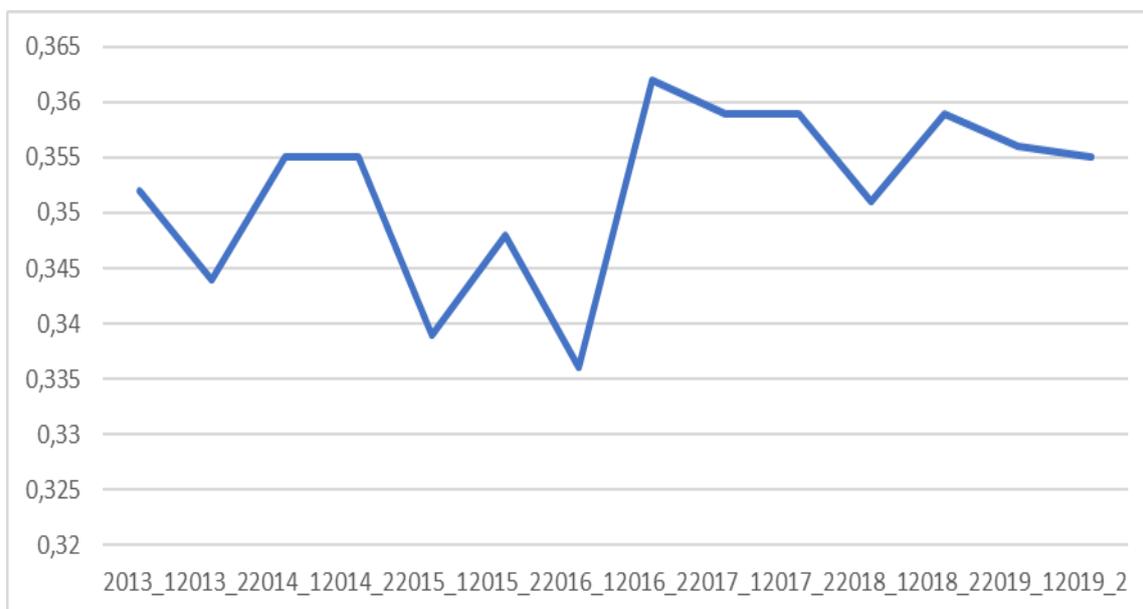
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2020

Pada gambar 1 terlihat pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT melambat sejak tahun 2012 hingga 2015. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh kekeringan yang

melanda provinsi ini (Antara, 2015). Selanjutnya, tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT mengalami peningkatan akibat adanya fenomena *La*

Nina (Antara, 2016). Namun, sejak tahun 2016 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT cenderung stagnan. Hal ini

karena tidak ada yang merangsang pertumbuhan ekonomi di provinsi ini (Lewokeda, 2020).



Gambar 2. Rasio Gini Provinsi NTT dari Tahun 2013 Semester 1 sampai 2019 Semester 2  
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2020

Selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi NTT juga cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2017 (Gambar 2). Dari tahun 2016 semester I hingga tahun 2019 semester II, indeks gini di Provinsi NTT bertambah sebesar 0,02 poin.

Tingginya ketimpangan antar daerah di Provinsi NTT menjadi penyebab tingginya ketimpangan penduduk dan tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi. Perekonomian di Provinsi NTT sangat terpusat di Kota Kupang. PDRB Perkapita dan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang jauh di atas kabupaten yang lain di Provinsi NTT. Kota Kupang memiliki pendapatan perkapita mencapai 56,5 juta dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,29 persen. Sementara itu, Kabupaten Sumba Timur yang memiliki pendapatan perkapita tertinggi kedua hanya sebesar 24,2 juta dan pertumbuhannya 5,11 persen.

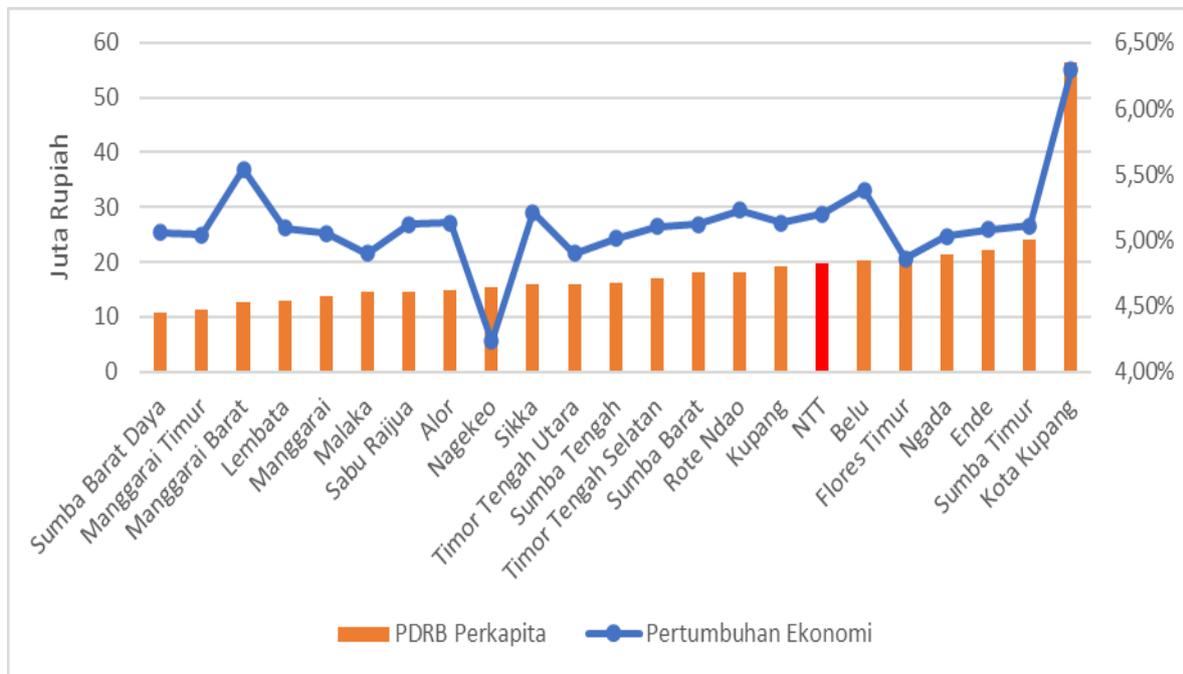
Selain itu, terdapat 16 dari 22 kabupaten/kota yang memiliki pendapatan perkapita di bawah angka provinsi. Kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita rendah juga relatif tidak bertumbuh lebih cepat dari daerah dengan pendapatan perkapita yang tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten yang memiliki pendapatan perkapita di bawah angka provinsi sebesar 5,05 persen, sedangkan yang memiliki pendapatan perkapita di atas angka provinsi sebesar 5,29 persen.

Ketimpangan pendapatan berkaitan erat dengan distribusi pendapatan yang tidak merata. Menurut Gallo (2002) dan Todaro dan Smith (2012) terdapat dua konsep utama dari distribusi pendapatan, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan personal. Pendekatan fungsional menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi.

Sedangkan, pendekatan personal menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu (Gallo, 2002). Penggunaan pendekatan personal tidak memedulikan sumber pendapatan dari seseorang (Todaro & Smith, 2012). Pendekatan ini sering digunakan untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk atau daerah.

Kebijakan yang tepat untuk mengurangi ketimpangan bisa diperoleh dengan melakukan penelitian tentang ketimpangan tersebut (Putri dan Dartanto, 2016). Putri dan Dartanto (2016) melakukan penelitian tentang ketimpangan yang

didekomposisikan berdasarkan pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, dan wilayah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu penyebab ketimpangan adalah peningkatan pendapatan penduduk di daerah perkotaan. Penelitian tentang ketimpangan pendapatan antar daerah juga dilakukan oleh Irkham (2019) yang menunjukkan ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi Banten bukan disebabkan oleh struktur ekonomi di kabupaten/kota melainkan adanya Penanaman Modal Asing (PMA) yang tinggi di beberapa kabupaten/kota.



Gambar 3. PDRB Perkapita (Juta rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2020

Pendapatan (total produksi/output) suatu daerah atau dalam hal ini PDB/PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor. Model Persamaan Solow menggambarkan hubungan dari total produksi atau dalam hal ini PDB/PDRB dengan faktor yang mempengaruhinya dalam persamaan berikut:

$$Y = F(K, LXE) \dots\dots\dots (1)$$

Y merupakan total produksi yang dipengaruhi oleh total modal K, total pekerja L, dan efisiensi tenaga kerja E. Efisiensi tenaga kerja dimaksudkan untuk mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode produksi. Efisiensi tenaga

kerja meningkat ketika ada peningkatan dalam kesehatan, pendidikan, atau keterampilan angkatan kerja (Mankiw, 2016).

Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai pendekatan terhadap jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwandari dan Wahyuni (2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bado (2016) serta Agustini dan Kurniasih (2017) juga menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) (Badan Pusat Statistik, 2020). Appiah, Amoasi, dan Frowne (2019) dalam penelitiannya tentang dampak IPM terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan. Selain itu, komponen dari IPM juga secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sutrisna (2014).

Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud (DJPK, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2017) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga

disebutkan dalam penelitian Utami dan Indrajaya (2019) serta Rizky, Agustin, dan Mukhlis (2016).

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita atau dalam hal ini adalah PDRB perkapita merupakan PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang tidak optimal serta tidak diikuti pemerataan pendapatan antar daerah dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang semu. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi tidak inklusif dan dinikmati oleh kalangan tertentu saja (Cahyono, 2017).

Penelitian ini selain memberikan gambaran ketimpangan antar wilayah juga menganalisis determinan dari posisi ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis ketimpangan antar kabupaten/kota serta antar pulau dan faktor-faktor yang memengaruhi posisi ekonomi kabupaten/kota di Provinsi NTT.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data *cross section* periode tahun 2019 dari publikasi “Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka Tahun 2020” kecuali belanja modal yang diambil dari situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Analisis deskriptif pada penelitian ini menggunakan Indeks Theil dan Analisis Tipologi Klassen. Indeks Theil digunakan untuk melakukan dekomposisi ketimpangan pendapatan pada satu periode waktu (dekomposisi statis), sehingga dapat berfokus pada analisis karakteristik wilayah. Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan posisi ekonomi kabupaten/kota di Provinsi NTT. Sementara itu, Regresi Logistik Multinomial digunakan

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi (determinan) posisi ekonomi kabupaten/kota.

**Indeks Theil**

Conceicao dan Ferreira (2000) menjelaskan bahwa Indeks Theil merupakan salah satu ukuran ketimpangan yang cocok digunakan dalam mengukur ketimpangan antarkelompok. Pengukuran ketimpangan dengan indikator ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah bisa mendekomposisi ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti ketimpangan antarkelompok dan di antara individu dalam kelompok bisa diketahui dengan menggunakan Indeks Theil. Selain itu, sumbangsih dari masing-masing individu terhadap ketimpangan total juga bisa diketahui dengan indeks ini.

Indeks Theil dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi NTT. Ketimpangan tersebut nantinya akan didekomposisi menjadi ketimpangan antar pulau dan antar kabupaten/kota dalam satu pulau. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTT akan dikelompokkan ke dalam tiga pulau yaitu: Pulau Timor, Pulau Sumba, dan Pulau Flores. Pulau Timor mencakup Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Malaka, Belu, Rote Ndao, Sabu Raijua, dan Kota Kupang. Pulau Sumba mencakup Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat. Pulau Flores mencakup Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, dan Alor. Formula indeks theil yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$T_i = \sum_{j=1}^J \left( \frac{Y_{ij}}{Y_i} \right) \ln \left( \frac{\frac{Y_{ij}}{Y_i}}{\frac{n_{ij}}{n_i}} \right) \dots\dots\dots (2)$$

$$T_w = \sum_{i=1}^I \left( \frac{Y_i}{Y} \right) T_i \dots\dots\dots (3)$$

$$T_b = \sum_{i=1}^I \left( \frac{Y_i}{Y} \right) \ln \left( \frac{\frac{Y_i}{Y}}{\frac{n_i}{n}} \right) \dots\dots\dots (4)$$

$$T = T_w + T_b \dots\dots\dots (5)$$

Keterangan :

- $T_i$  = Indeks Theil pada pulau ke-*i*
- $T_b$  = Indeks Theil antar pulau
- $T_w$  = Indeks Theil total antar kabupaten dalam masing-masing pulau
- $T$  = Indeks Theil Total
- $Y_{ij}$  = PDRB pada pulau ke-*i* dan kabupaten ke-*j*
- $Y_i$  = PDRB pada pulau ke-*i*
- $Y$  = PDRB Provinsi NTT
- $n_{ij}$  = Jumlah penduduk pulau ke-*i* kabupaten ke-*j*
- $n_i$  = Jumlah penduduk pulau ke-*i*
- $n$  = Jumlah penduduk Provinsi NTT
- $I$  = Jumlah kelompok Kabupaten berdasarkan pulau
- $J$  = Jumlah kabupaten pada satu pulau

**Tipologi Klassen**

Tipologi Klassen pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan ketimpangan secara lebih nyata (Hadi, 2003). Dua indikator utama yang digunakan untuk membagi kabupaten/kota seperti yang dilakukan Hadi (2003) dan Irkham (2019) yaitu, rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2019 digunakan sebagai sumbu vertikal, sedangkan rata-rata pendapatan per kapita kabupaten/kota digunakan sebagai sumbu horizontal. Kedua indikator ini akan menentukan posisi ekonomi dari kabupaten/kota di Provinsi NTT.

Tabel 1.  
Klasifikasi Posisi Ekonomi Kabupaten/Kota berdasarkan Tipologi Klassen

Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Perkapita	Lebih Kecil dari Rata-rata Kabupaten/Kota	Lebih Besar atau Sama dengan Rata-rata Kabupaten/Kota
	Lebih Besar atau Sama dengan Rata-rata Kabupaten/Kota	(3) Daerah Berkembang Cepat	(1) Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh
Lebih Kecil dari Rata- rata Kabupaten/Kota	(4) Daerah Relatif Tertinggal	(2) Daerah Maju Tapi Tertekan	

Sumber: Hadi, 2003

Terdapat empat klasifikasi posisi ekonomi yang terbentuk dari pembagian tersebut sesuai dengan tabel 1. Kriteria yang digunakan dalam pembagian ini sebagai berikut : (1) Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi NTT, (2) Daerah maju tetapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dari rata-rata Provinsi NTT. (3) Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi NTT. (4) Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTT. Setiap kabupaten/kota akan diberikan kode sesuai klasifikasinya.

**Regresi Logistik Multinomial**

Model regresi logistik multinomial yang digunakan memiliki empat kategori variabel dependen sesuai dengan klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi NTT berdasarkan Tipologi Klassen. Dari keempat kategori tersebut, klasifikasi (4) atau daerah relatif tertinggal diperlakukan sebagai kategori referensi. Model regresi logistik multinomial yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{\pi_1}{\pi_4}\right) = \beta_1 + \beta_{11} TK + \beta_{12} IPM + \beta_{13} BM \dots\dots\dots (6)$$

$$\ln\left(\frac{\pi_2}{\pi_4}\right) = \beta_2 + \beta_{21} TK + \beta_{22} IPM + \beta_{23} BM \dots\dots\dots (7)$$

$$\ln\left(\frac{\pi_3}{\pi_4}\right) = \beta_3 + \beta_{31} TK + \beta_{32} IPM + \beta_{33} BM \dots\dots\dots (8)$$

Keterangan :

$\ln\left(\frac{\pi_1}{\pi_4}\right)$  = Logaritma natural dari kecenderungan suatu kabupaten klasifikasi (4) untuk menjadi kabupaten klasifikasi (1)

$\ln\left(\frac{\pi_2}{\pi_4}\right)$  = Logaritma natural dari kecenderungan suatu kabupaten klasifikasi (4) untuk menjadi kabupaten klasifikasi (2)

$\ln\left(\frac{\pi_3}{\pi_4}\right)$  = Logaritma natural dari kecenderungan suatu kabupaten klasifikasi (4) untuk menjadi kabupaten klasifikasi (3)

$TK$  = Jumlah penduduk usia >15 tahun yang bekerja tahun 2019

$AHH$  = Angka Harapan Hidup tahun 2019

$RLS$  = Rata-rata Lama Sekolah tahun 2019

$BM$  = Realisasi belanja modal tahun 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketimpangan Antar Kabupaten Kota

Kontribusi masing-masing wilayah terhadap ketimpangan total terlihat jelas dengan pengukuran menggunakan Indeks Theil seperti pada Gambar 4. Selain itu, ketimpangan antar dan diantara pulau di Provinsi NTT juga dapat diukur nilai dan kontribusinya terhadap nilai ketimpangan secara keseluruhan.



Gambar 4. Indeks Theil di Provinsi NTT Tahun 2019  
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT 2020, data diolah

Indeks Theil keseluruhan yang mengukur ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi NTT bernilai 0,122 poin. Angka tersebut merupakan penjumlahan dari ketimpangan total antar kabupaten/kota dalam masing-masing pulau sebesar 0,098

poin dan antar pulau sebesar 0,024 poin. Ketimpangan antar pulau di Provinsi NTT relatif rendah. Penyumbang terbesar ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi NTT adalah ketimpangan di antara kabupaten/kota dalam masing-masing pulau.

Tabel 2.  
Indeks Theil antar Kabupaten/Kota di Pulau Timor Tahun 2019

No.	Kabupaten/Kota	$Y_{ij}$	$n_{ij}$	$\frac{Y_{ij}}{Y_i}$	$\frac{n_{ij}}{n_i}$	$\frac{Y_{ij}}{Y_i} \ln\left(\frac{\frac{Y_{ij}}{Y_i}}{\frac{n_{ij}}{n_i}}\right)$
1	Kota Kupang	24559	434972	0,438	0,194	0,356
2	Kupang	7710	403582	0,137	0,180	-0,037
3	Timor Tengah Selatan	7938	467990	0,141	0,209	-0,055
4	Timor Tengah Utara	4083	254171	0,073	0,113	-0,032
5	Malaka	2778	191892	0,050	0,086	-0,027
6	Belu	4481	220115	0,080	0,098	-0,016
7	Rote Ndao	3136	172104	0,056	0,077	-0,018
8	Sabu Raijua	1424	97379	0,025	0,043	-0,014
$T_i$						0,157

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT 2020, data diolah

Dari ketiga pulau di Provinsi NTT, Pulau Timor merupakan pulau yang memiliki ketimpangan antar kabupaten/kota terbesar. Penyumbang ketimpangan terbesar di pulau ini adalah Kota Kupang. Penduduk Kota Kupang yang berjumlah 19,4 persen dari total penduduk di Pulau Timor menikmati

43,8 persen dari pendapatan total di pulau tersebut (Tabel 2). Selain Kota Kupang, proporsi pendapatan yang diterima kabupaten lain di Pulau Timor lebih rendah dari proporsi penduduk di kabupaten tersebut.

Tabel 3.  
Penghitungan Indeks Theil antar Kabupaten di Pulau Sumba Tahun 2019

No.	Kabupaten	$Y_{ij}$	$n_{ij}$	$\frac{Y_{ij}}{Y_i}$	$\frac{n_{ij}}{n_i}$	$\frac{Y_{ij}}{Y_i} \ln\left(\frac{\frac{Y_{ij}}{Y_i}}{\frac{n_{ij}}{n_i}}\right)$
1	Sumba Timur	6257	258486	0,463	0,321	0,169
2	Sumba Tengah	1177	72800	0,087	0,090	-0,003
3	Sumba Barat Daya	3755	344720	0,278	0,428	-0,120
4	Sumba Barat	2334	129710	0,173	0,161	0,012
$T_i$						0,058

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT 2020, data diolah

Pulau Sumba merupakan pulau dengan ketimpangan antar kabupaten terbesar kedua

di NTT. Meskipun pada urutan kedua, besaran ketimpangan di pulau ini terlampau

jauh dari Pulau Timor. Kabupaten Sumba Timur merupakan kabupaten yang menyumbang ketimpangan terbesar di Pulau Sumba (Tabel 3). Penduduk Kabupaten Sumba Timur yang sebanyak 32,1 persen dari populasi di Pulau Sumba menikmati 46,3 persen dari total pendapatan di Pulau Sumba.

Tabel 4.  
Penghitungan Indeks Theil antar Kabupaten di Pulau Flores Tahun 2019

No.	Kabupaten	$Y_{ij}$	$n_{ij}$	$\frac{Y_{ij}}{Y_i}$	$\frac{n_{ij}}{n_i}$	$\frac{Y_{ij}}{Y_i} \ln\left(\frac{\frac{Y_{ij}}{Y_i}}{\frac{n_{ij}}{n_i}}\right)$
1	Manggarai Barat	3467	274689	0,090	0,114	-0,021
2	Manggarai	4680	338424	0,122	0,141	-0,018
3	Manggarai Timur	3212	287207	0,083	0,119	-0,030
4	Ngada	3474	163217	0,090	0,068	0,026
5	Nagekeo	2241	145826	0,058	0,061	-0,002
6	Ende	6107	273929	0,159	0,114	0,053
7	Sikka	5124	320401	0,133	0,133	0,000
8	Flores Timur	5252	255916	0,137	0,106	0,034
9	Lembata	1859	143074	0,048	0,059	-0,010
10	Alor	3055	205599	0,079	0,085	-0,006
$T_i$						0,027

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT 2020, data diolah

Pulau Flores memiliki ketimpangan antar kabupaten terendah di Provinsi NTT. Distribusi pendapatan di pulau ini relatif merata. Kabupaten yang menguasai pendapatan terbesar adalah Kabupaten Ende (Tabel 4). 15,9 persen dari total pendapatan di Pulau Flores dinikmati oleh Penduduk Kabupaten Ende yang berjumlah sekitar 11,4 persen dari total populasi di Pulau Flores.

Kondisi geografis Provinsi NTT yang merupakan daerah kepulauan bukanlah penyebab tingginya ketimpangan antar kabupaten/kota. Terpusatnya perekonomian dalam beberapa kabupaten/kota terutama Kota Kupang menjadi penyumbang terbesar ketimpangan antar wilayah di provinsi ini.

Kondisi ini juga mirip seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Dartanto (2016).

**Klasifikasi Posisi Ekonomi Kabupaten/Kota**

Klasifikasi posisi ekonomi kabupaten/kota berdasarkan Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten di Provinsi NTT berada pada posisi ekonomi daerah yang tertinggal (Tabel 5). Selain itu, terdapat tiga kabupaten/kota yang berada pada posisi ekonomi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Hal ini menjadi salah satu alasan ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi NTT susah untuk diatasi.

Tabel 5.  
Klasifikasi Posisi Ekonomi Kabupaten/Kota berdasarkan Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi NTT Tahun 2019

Pendapatan Perkapita Pertumbuhan Ekonomi	Lebih Kecil dari Rata-rata Kabupaten/Kota	Lebih Besar atau Sama dengan Rata-rata Kabupaten/Kota
Lebih Besar atau Sama dengan Rata-rata Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Sumba Barat</li> <li>2. Kabupaten Alor</li> <li>3. Kabupaten Sikka</li> <li>4. Kabupaten Rote Ndao</li> <li>5. Kabupaten Manggarai Barat</li> <li>6. Kabupaten Sabu Raijua</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kota Kupang</li> <li>2. Kabupaten Kupang</li> <li>3. Kabupaten Belu</li> </ol>
Lebih Kecil dari Rata-rata Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Timor Tengah Selatan</li> <li>2. Kabupaten Timor Tengah Utara</li> <li>3. Kabupaten Lembata</li> <li>4. Kabupaten Manggarai</li> <li>5. Kabupaten Sumba Tengah</li> <li>6. Kabupaten Sumba Barat Daya</li> <li>7. Kabupaten Nagekeo</li> <li>8. Kabupaten Manggarai Timur</li> <li>9. Kabupaten Malaka</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Sumba Timur</li> <li>2. Kabupaten Flores Timur</li> <li>3. Kabupaten Ende</li> <li>4. Kabupaten Ngada</li> </ol>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT 2020, data diolah

Kabupaten yang berada pada kategori daerah maju tetapi tertekan adalah Kabupaten Sumba Timur, Flores Timur, Ende, dan Ngada. Keempat kabupaten ini susah untuk menyusul kabupaten/kota pada klasifikasi (1) karena rendahnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, enam kabupaten pada klasifikasi (3) memiliki kemungkinan untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten yang berada pada klasifikasi (2).

Tabel 6 menunjukkan perbedaan rata-rata pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita,

jumlah tenaga kerja, IPM, dan belanja modal kabupaten/kota berdasarkan posisi ekonominya. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota pada klasifikasi (1) memiliki perbedaan cukup jauh dibandingkan klasifikasi yang lain. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi pada kategori (2) sampai (4) tidak terlalu jauh perbedaannya. PDRB Perkapita kabupaten/kota pada klasifikasi (1) dan (2) juga terlihat berbeda dibandingkan klasifikasi (3) dan (4) yang relatif sama.

Tabel 6.  
Karakteristik Kabupaten/Kota berdasarkan Klasifikasi Posisi Ekonomi di Provinsi NTT Tahun 2019

Klasifikasi Posisi Ekonomi	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	Rata-rata PDRB Perkapita (Juta Rupiah)	Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja (Ribuan)	Rata-rata IPM (Persen)	Rata-rata Belanja Modal (Milyar Rupiah)
(1)	5,60	31,97	137423,00	68,84	206,43
(2)	5,02	22,08	108498,50	66,16	217,33
(3)	5,23	15,72	88479,50	61,95	192,47
(4)	4,93	14,22	113059,22	62,77	205,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT 2020, data diolah

Selain itu, rata-rata IPM pada klasifikasi (1) dan (2) terlihat berbeda dibandingkan klasifikasi (3) dan (4) yang terlihat relatif sama. Kedua variabel lainnya terlihat tidak begitu berbeda jauh nilainya antar klasifikasi. Jumlah tenaga kerja tertinggi terdapat pada klasifikasi (1) dan yang terendah terdapat pada klasifikasi (3). Nilai belanja modal tertinggi terdapat pada klasifikasi (2) dan yang terendah terdapat pada klasifikasi (3).

Tabel 7.  
Output Regresi Logistik Multinomial

Klasifikasi <sup>a</sup>		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)
1,00	Intercept	-53,722	28,600	3,528	1	,060	
	TK	,020	,022	,799	1	,371	1,020
	IPM	,842	,442	3,627	1	,057	2,322
	BM	-,020	,024	,713	1	,399	,980
2,00	Intercept	-47,854	27,485	3,031	1	,082	
	TK	-,002	,020	,011	1	,916	,998
	IPM	,727	,426	2,920	1	,087	2,069
	BM	,003	,019	,026	1	,873	1,003
3,00	Intercept	3,121	14,798	,044	1	,833	
	TK	-,013	,016	,657	1	,418	,987
	IPM	-,040	,248	,026	1	,873	,961
	BM	,001	,016	,005	1	,941	1,001

Sumber : Output SPSS Versi 22

**Determinan Posisi Ekonomi**

Hasil pengolahan data dengan menggunakan regresi logistik multinomial (Tabel 7) dapat dituangkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{\pi_1}{\pi_4}\right) = -53,722 + 0,020 TK + 0,842 IPM^* - 0,020 BM \dots\dots\dots (9)$$

$$\ln\left(\frac{\pi_2}{\pi_4}\right) = -47,854 - 0,002 TK + 0,727 IPM^* + 0,003 BM \dots\dots\dots (10)$$

$$\ln\left(\frac{\pi_3}{\pi_4}\right) = 3,121 - 0,013 TK - 0,040 IPM + 0,001 BM \dots\dots\dots (11)$$

\*Keterangan: signifikan pada  $\alpha=0,1$

Persamaan ke-9 menjelaskan model regresi tentang kecenderungan suatu kabupaten klasifikasi (4) untuk menjadi kabupaten klasifikasi (1). Dari ketiga variabel, hanya IPM yang berpengaruh signifikan. Kenaikan satu persen IPM akan mengakibatkan kecenderungan kabupaten klasifikasi (4) untuk menjadi kabupaten klasifikasi (1) sebesar 2,32 kali. Hal ini menunjukkan kualitas dari SDM/pekerja sangat penting dalam meningkatkan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM dapat meningkatkan efisiensi dari pekerja (Mankiw, 2016). Tentunya peningkatan dari efisiensi pekerja dapat meningkatkan produktivitas dari pekerja tersebut yang berujung pada peningkatan produksi. Kondisi ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Appiah, Amoasi, dan Frowne (2019) serta Dewi dan Sutrisna (2014).

Model regresi pada persamaan ke-10 memiliki tipikal yang sama dengan model regresi pada persamaan ke-9. Kualitas dari

SDM signifikan berpengaruh terhadap kecenderungan kabupaten klasifikasi (4) untuk menjadi kabupaten dengan klasifikasi (2). Setiap peningkatan satu persen dari IPM dapat meningkatkan kecenderungan dari kabupaten klasifikasi (4) untuk menjadi kabupaten klasifikasi (2) sebesar 2,06 kali. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas SDM untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Persamaan ke-10 dan ke-9 juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM di daerah dengan klasifikasi (4) menjadi kunci mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi NTT.

Pada persamaan ke-11 tidak terdapat variabel yang signifikan dalam mempengaruhi kecenderungan kabupaten dengan klasifikasi (4) untuk menjadi kabupaten dengan klasifikasi (3). Hal ini bisa disebabkan karena kabupaten-kabupaten yang ada pada dua klasifikasi ini tidak memiliki karakteristik faktor produksi yang berbeda jauh. Pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi dari kedua kategori ini juga tidak terlalu berbeda.

Belanja modal suatu daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap posisi ekonomi suatu kabupaten/kota. Kondisi ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Waryanto (2017), Utami dan Indrajaya (2019), serta Rizky, Agustin, dan Mukhlis (2016). Nilai dari belanja modal memang tidak begitu berbeda jauh antar kategori seperti yang disebutkan sebelumnya. Pengalokasian belanja modal yang tidak tepat menjadi salah satu penyebab variabel ini tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Fajri, 2016).

Jumlah tenaga kerja juga tidak berpengaruh signifikan terhadap posisi ekonomi suatu kabupaten/kota. Kondisi ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan

oleh Purwandari dan Wahyuni (2016), Bado (2016), serta Agustini dan Kurniasih (2017). Salah satu penyebabnya adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah. Produktivitas dari tenaga kerja yang rendah mengakibatkan kontribusi dari tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah (Mankiw, 2016).

## SIMPULAN

Penyumbang terbesar ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi NTT adalah ketimpangan antar kabupaten/kota dalam masing-masing pulau. Sementara itu, ketimpangan antar pulau di Provinsi NTT relatif rendah. Pulau Timor merupakan daerah dengan ketimpangan antar kabupaten/kota yang paling tinggi.

Terdapat sembilan kabupaten di Provinsi NTT yang termasuk ke dalam kategori daerah yang tertinggal. Di samping itu, terdapat tiga kabupaten/kota yang termasuk ke dalam kategori daerah cepat maju dan tumbuh.

Kualitas SDM/pekerja berpengaruh signifikan untuk meningkatkan kecenderungan dari kabupaten dengan klasifikasi daerah tertinggal untuk menjadi daerah dengan klasifikasi cepat tumbuh dan maju atau maju tetapi tertekan. Sementara

itu, jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bekerja dan realisasi belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap posisi ekonomi kabupaten/kota.

Penyebab susahinya pengentasan ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi NTT adalah banyaknya kabupaten yang termasuk ke dalam kategori daerah yang tertinggal dan sedikitnya kabupaten yang termasuk ke dalam kategori daerah cepat maju dan tumbuh. Peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi NTT. Hal ini karena peningkatan kualitas SDM dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi terutama pada daerah tertinggal.

Penelitian ini hanya menganalisis dekomposisi ketimpangan pendapatan dalam satu periode waktu saja (dekomposisi statis). Oleh karena itu, penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan analisis dekomposisi ketimpangan pendapatan antar waktu (dekomposisi dinamis), sehingga dapat menganalisis perubahan proporsi populasi dan pendapatan serta lebih dapat menjelaskan perubahan ketimpangan yang terjadi yang terjadi antar waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, Y., & Kurniasih, E. P. (2017). Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 97-119.
- Antara. (2015, February). *Ekonomi*. Retrieved May 18, 2021, from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/246914>
- Antara. (2016, December). *Ekonomi*. Retrieved May 18, 2021, from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/405022>
- Appiah, M., Amoasi, R., & Frowne, D. I. (2019). Human Development and Its Effects on Economic Growth and Development. *Business Studies*, 101-109.

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2020). *Nusa Tenggara Timur Dalam Angka*. Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bado, B. (2016). Analisis Belanja Modal, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 118-126.
- Cahyono, E. (2017, January). *Publikasi*. Retrieved January 10, 2021, from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/pemerataan-kesejahteraan-rakyat/>
- Conceicao, P., & Ferreira, P. (2000). The Young Person's Guide to the Theil Index: Suggesting Intuitive Interpretations and Exploring Analytical Applications. *UTIP Working Paper Number 14*, 1-54.
- Dewi, N. L., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *Ekonomi Pembangunan*, 76-123.
- Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020, October). *Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan*. Retrieved January 15, 2021, from APBD: [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/LRA-2019\\_update-21-Oktober-2020.xlsx](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/04/LRA-2019_update-21-Oktober-2020.xlsx)
- DJPK. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Klasifikasi Anggaran*. Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan Tentang Klasifikasi Anggaran. Retrieved January 10, 2021, from Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Fajri, A. (2016). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sumatera. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 29-35.
- Gallo, C. (2002). *Economic Growth and Income Inequality: Theoretical Background and Empirical Evidence*. London: Development Planning Unit, University College London.
- Hadi, S. (2003). *Analisis Pengaruh Investasi, SDM, SDA, Aglomerasi, dan Teknologi Terhadap Posisi Perekonomian Daerah Kabupaten/Kota Menurut Tipologi Klassen Di Jawa Tengah Tahun 2000 [Tesis]*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2015, July). *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. Retrieved January 5, 2021, from Publikasi: <https://setkab.go.id/pemerintah-fokus-atasi-kesenjangan-di-nusa-tenggara-timur/>
- Irkham, M. (2019). Analisis ketimpangan wilayah. *Journal FEB Unmul*, 98-110.
- Lewokeda, A. (2020, February). *Berita*. Retrieved May 18, 2021, from Antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/1280257>
- Mankiw, N. G. (2010). *Macroeconomics Seventh Edition*. Worth Publishers.
- Mankiw, N. G. (2016). *Macroeconomics Ninth Edition*. New York: Worth Publishers.
- Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. (2020, April 29).
- Peraturan Presiden Tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (2020).

- Purwandari, A. E., & Wahyuni, K. T. (2016). Pendekatan Model Panel Dinamis dalam Kajian Konvergensi Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003-2014. *Seminar Nasional Matematika Dan Pendidikan Matematika UNY*, 50-51.
- Putri, A. D., & Dartanto, T. (2016). Dekomposisi Perubahan Ketimpangan di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jurnal Ekonomi dan Study Pembangunan*, 72-91.
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 10-16.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development Eleventh Edition*. Pearson: New York.
- Utami, D. N., & Indrajaya, I. G. (2019). Pengaruh Pad Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana [Online]*, 2195-2225.
- Waryanto, P. (2017). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik*, 35-55.